

Strategi Komunikasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Korban Konflik Poso

Muhammad Khairil

Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Tadulako

Jln. Soekarno Hatta Km. 9 Kota Palu Sulawesi Tengah

HP. 0811456664, e-mail : Muh_Khairil02@Yahoo.Com

Abstract

A number of religious-social conflicts, either among fellow adherent of the same religion or different beliefs, occur in everyday life. Human blame each other and claim their own truth over others. The aim of this study is to examine and elaborate communication strategy, which had been initiated in the process of empowerment of conflict-affected communities in Poso. The research method used was descriptive-qualitative method by applying the “emic perspective”. It is conducted by establishing priority subjects on the situation. The research results show, among others, that, first, Poso society is divided into three phases, i.e. pre, during and post conflict. Second, the strategic steps in an effort to empower people in the region, at least, can be done through two ways. They are peace education based on religious and cultural pluralism and the strengthening of social capital. Lastly, communication strategy in an effort to empower people who suffered from the conflict can be done using three approaches: intra-personal communication in the form of negotiation, communication groups and organizations in the establishment of the Communications Religious Followers Forum (FKUB), and culture-based mass communication as well as the publication of the implementation of the Lake Poso Festival (FDP).

Abstrak

Berbagai konflik sosial bernuansa agama baik antar sesama pemeluk ajaran satu agama maupun yang berbeda keyakinan seringkali mewarnai kehidupan setiap insan beragama. Manusia saling menyalahkan satu sama lain, klaim kebenaran sebagai kebenaran mutlak, hakim menghakimi sehingga saling membunuh satu sama lain atas nama agama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi yang selama ini dilakukan dalam proses pemberdayaan masyarakat korban konflik Poso berbasis agama dan budaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan perspektif emik yaitu mengutamakan pandangan dan pendirian subjek penelitian terhadap situasi yang dihadapinya.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; *pertama*, kehidupan masyarakat Poso terbagi dalam tiga fase yaitu pra konflik, saat konflik, dan pasca konflik. *Kedua*, langkah-langkah strategis dalam upaya pemberdayaan masyarakat setidaknya dilakukan dalam dua hal yaitu pendidikan damai berbasis pluralisme agama dan budaya serta penguatan modal sosial. *Ketiga*, strategi komunikasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu komunikasi antarpesonal dalam bentuk negosiasi, komunikasi kelompok, dan organisasi dalam bentuk pembentukan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dan komunikasi massa berbasis budaya seperti halnya publikasi pelaksanaan Festival Danau Poso (FDP).

Kata kunci: konflik poso, pemberdayaan masyarakat, dan strategi komunikasi

Pendahuluan

Salah satu temuan menarik yang dikemukakan Colombijn dan Lindbald adalah keke-
rasan dipandang sebagai cara legitim “hanya jika
ditujukan pada orang asing (*outsiders*).” Di sini,
“orang asing” merupakan hasil konstruksi sosial
berdasarkan situasi dan konteks tertentu. Mereka
bisa merupakan orang-orang di luar kelompok
(*outgroup*), tetapi bisa juga anggota di dalam
kelompok (*ingroup*) yang dipersepsi sebagai
“orang asing”. Hasil konstruksi yang sama sekali
imajiner, suatu kategori yang dapat dikenakan pada
siapa saja, seperti “zionis”, “kapitalis”, “komunis”,
yang tidak pernah jelas dan berlaku semena-mena
(Hidayat, 2001).

Berbagai konflik sosial bernuansa agama
baik antar sesama pemeluk ajaran satu agama
maupun yang berbeda keyakinan seringkali me-
warnai kehidupan setiap insan beragama. Manu-
sia saling menyalahkan satu sama lain, klaim ke-
benaran sebagai kebenaran mutlak, hakim meng-
hakimi hingga saling membunuh satu sama lain atas
nama agama. Akar persoalan yang sesungguhnya
adalah hanya karena keberagamaan yang bersifat
subjektif, menonjolkan nilai-nilai egoisme dan
arogansi, sehingga perspektif nilai kebenaran da-
lam beragama hanya dipandang dari satu sudut
pandang.

Agama sering diposisikan sebagai objek
kajian metafisis yang hasil dan tingkat kebenar-
annya dianggap spekulatif, namun secara sosial
kenyataannya dampak kehadiran agama meru-
pakan sumber peradaban yang cukup besar dalam
sejarah kemanusiaan, namun agama juga meru-
pakan sumber konflik sosial yang amat kejam dan
berkepanjangan.

Berbagai konflik sosial bernuansa agama
baik antar sesama pemeluk ajaran satu agama
maupun yang berbeda keyakinan seringkali me-
warnai kehidupan setiap insan beragama. Manu-
sia saling menyalahkan satu sama lain, klaim ke-
benaran sebagai kebenaran mutlak, hakim meng-
hakimi hingga saling membunuh satu sama lain atas
nama agama. Akar persoalan yang sesungguhnya
adalah hanya karena keberagamaan yang bersifat
subjektif, menonjolkan nilai-nilai egoisme dan aro-
gansi, sehingga perspektif nilai kebenaran dalam

beragama hanya dipandang dari satu sudut
pandang.

Di Maluku, Ambon, dan di Poso, masya-
rakatnya sibuk saling membunuh atas nama Tuhan
mereka masing-masing. Ironisnya, ketika berbagai
persoalan sosial keagamaan muncul bukan untuk
menjadikan Tuhan sebagai “sebab” dan “tujuan”
segala permohonan dan pengabdian, melainkan
Tuhan dipinjamkan nama-Nya, guna dimanfaat-
kan sebagai alat, sebagai instrumen politik untuk
membenarkan berbagai tindakan yang justru me-
lawan kehendak Tuhan itu sendiri.

Perbincangan tentang agama seringkali
berakhir dengan perbedaan yang meruncing hanya
karena masing-masing memandang agama dari
dimensi-dimensi yang berbeda. Di sinilah dibu-
tuhkan semangat Pluralisme, toleransi dan budaya
komunikasi yang dibangun berdasarkan kesadaran
umat beragama. Setidaknya semangat tersebut
dapat terbangun dengan satu slogan yang me-
ngatakan “Tidak!” pada kekerasan dan “Ya!” pa-
da kehidupan. Perjuangan demi pluralisme erat
kaitannya dengan perjuangan melawan budaya
kekerasan.

Berdasarkan berbagai uraian tersebut ma-
ka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk
mendapatkan gambaran penghidupan dan kehi-
dupan masyarakat korban konflik Poso dalam
upaya proses penyadaran yang lebih baik untuk
mewujudkan kesejahteraan dalam tatanan ha-
rmonitas masyarakat di tengah pluralisme agama
dan multibudaya. Tujuan lain yang juga hendak
dicapai adalah menemukan langkah-langkah
strategis (intervensi yang tepat) untuk dapat me-
ningkatkan pengetahuan dan kesadaran masya-
rakat tentang nilai-nilai pluralisme agama dan ten-
tang nilai Multikulturalisme sehingga terwujud
toleransi dan budaya komunikasi masyarakat yang
santun. Pada akhirnya, orientasi tujuan akhir pene-
litian ini adalah merumuskan strategi komunikasi
berbasis pluralisme agama dan multibudaya bagi
masyarakat korban konflik di Kabupaten Poso Su-
lawesi Tengah dalam upaya pemberdayaan ma-
syarakat untuk mewujudkan perdamaian.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat
bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang
situasi dan kondisi kehidupan dan penghidupan
masyarakat Poso khususnya pasca konflik sebagai

rujukan dalam pemberdayaan masyarakat melalui strategi komunikasi berbasis pluralisme agama dan multibudaya. Selain manfaat tersebut, manfaat lainnya adalah penelitian ini dapat membangun mekanisme yang secara sistematis mampu mengintegrasikan nilai sosial di atas nilai-nilai demokrasi yang mengedepankan keberagaman dalam kebersamaan dengan tanggung jawab bersama yang dirumuskan dalam strategi komunikasi. Pada akhirnya diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk mendorong percepatan pemulihan kondisi Poso yang lebih kondusif melalui proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan pendekatan dan strategi komunikasi berbasis pluralisme agama dan multikulturalisme.

Pemberdayaan Masyarakat Pasca Konflik Poso

Pemberdayaan secara konseptual hendaknya dimaknai sebagai usaha maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proses transformasi di semua lini kehidupan masyarakat. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan upaya perbaikan kualitas hidup dan memperluas kemampuan mereka dalam mengadaptasikan diri terhadap perubahan. Oleh karena itu, pemberdayaan tidak cukup hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, nilai ekspor, nilai investasi, produk domestik bruto (PDB), menekan laju inflasi dan menurunkan *debt service ratio*. Namun, pemberdayaan mencakup jauh lebih luas dari itu.

Pemberdayaan mencakup pendidikan dan kesempatan kerja yang lebih merata, kesetaraan gender yang lebih berimbang, kesehatan dan nutrisi masyarakat yang lebih baik, penyelenggaraan sistem hukum dan peradilan yang lebih adil, lingkungan alam yang lebih bersih dan lestari, kebebasan politik dan sipil yang lebih luas, dan kehidupan kultural yang lebih kaya makna. Pemberdayaan yang akan diintrodusir di Poso hendaknya diorientasikan kepada empat prinsip dasar yang membentuk proses pemberdayaan, khususnya proses integrasi dan interaksi, menjadi lebih berkualitas, yaitu; (1) Berakar pada nilai-nilai agama, kehidupan sosial budaya, dan nilai-nilai kejujuran

dan kebangsaan, agar terbentuk kepribadian, jatidiri, dan nasionalisme sebagai bangsa Indonesia yang beradab dan berdaulat; (2) Berfokus pada modal utama pemberdayaan, meliputi modal fisik, modal manusia, modal sosial-budaya, dan modal alam (lingkungan), agar kapasitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan; (3) Berpijak pada aspek-aspek distributonal yang berimplikasi kepada distribusi peluang memperoleh pendapatan yang lebih merata, memperbesar kapasitas masyarakat untuk memanfaatkan teknologi dan memperoleh pendapatan, agar peluang terjadinya kesenjangan ekonomi, sosial budaya, dan kesenjangan pemberdayaan antar kawasan atau wilayah yang rawan konflik dapat direduksi; (4) Beroperasi pada kerangka kerja institusional pemerintahan yang amanah, yaitu adanya kerangka kerja regulatif, berfungsinya birokrasi secara efektif dan efisien, terwujudnya kebebasan sipil dan institusi yang transparan dan bertanggung jawab menjamin tegaknya keadilan hukum dan partisipasi sosial, serta terbangunnya sarana dan prasarana fisik yang mendukung terciptanya kohesi sosial (Marzuki, 2006:25).

Isu agama dan atas nama kebenaran agama menjadi isu sentral dalam berbagai tindakan anarkis yang mulai menggelinding di tengah-tengah masyarakat baik masyarakat yang beragama Islam maupun masyarakat beragama Kristen. Ini seperti yang diungkap oleh berbagai konflik sosial bernuansa agama baik antar sesama pemeluk ajaran satu agama maupun yang berbeda keyakinan seringkali mewarnai kehidupan setiap insan beragama.

Manusia saling menyalahkan satu sama lain, klaim kebenaran sebagai kebenaran mutlak, hakim menghakimi hingga saling membunuh satu sama lain atas nama agama. Akar persoalan yang sesungguhnya adalah hanya karena keberagaman yang bersifat subjektif, menonjolkan nilai-nilai egoisme dan arogansi, sehingga perspektif nilai kebenaran dalam beragama hanya dipandang dari satu sudut pandang.

Model penyelesaian konflik dengan isu agama dan etnik dapat dilakukan dengan berbagai alternatif diantaranya adalah model penyelesaian konflik secara universal dan model penyelesaian konflik secara lokal. Model penyelesaian konflik secara universal terdapat dua model yaitu;

Pertama, belajar dari literatur klasik perihal upaya penyelesaian konflik berdasarkan kepada paradigma "*Truth and Justice*" dan pengalaman implementasinya di Kosovo dan Ruanda (Hugh, Oliver & Tom, 2000: 18). Paradigma ini berasumsi bahwa kebenaran didapat dengan cara menegakkan hukum. Dengan syarat norma hukumnya telah ada baik nasional maupun internasional. Para penegak hukumnya dapat dipercaya. Kesadaran hukum masyarakat cukup tinggi.

Kedua, "*Truth and Reconciliation*" (De Merwe, 2002:18). Paradigma ini beranggapan bahwa kebenaran dapat ditemukan dengan bertumpu kepada partisipasi seluruh pihak yang terlibat dalam konflik secara demokratis, membangun sistem hukum serta proses yang terbuka untuk penegakan hukum dan proses rekonsiliasi dilakukan melalui proses "*forgiveness*". Model kedua ini diterapkan di Afrika Selatan ketika Nelson Mandela terpilih menjadi Presiden pada tahun 1994.

Untuk model penyelesaian konflik secara lokal dapat diklasifikasikan ke dalam dua model yaitu;

Pertama, "*Truth and resolution*" (Malik dan kawan-kawan, 2003). Paradigma ini mengasumsikan bahwa kebenaran dapat diwujudkan dengan bertumpu kepada agenda dari masyarakat korban konflik karena fakta menunjukkan saat terjadi konflik terlihat bahwa sistem hukum sudah lumpu. Para pemimpin yang terdiri dari pemerintah Daerah dan Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), beserta aparat negara seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Polisi Republik Indonesia (POLRI) telah menjadi bagian dari permasalahan (*Part of Problems*), bukan bagian dari solusi (*Part of solutions*). Dalam mewujudkan model tersebut setidaknya melewati tiga tahapan yaitu tahap penghentian kekerasan, kemudian tahap pemberdayaan sosial ekonomi dan tahap penegakan hukum.

Kedua, model Pengembangan budaya komunikasi masyarakat lokal. Menurut Koenjaraningrat (1990:59) bahwa kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang dipergunakan untuk memahami dan mengintegrasikan lingkungan hidupnya dan menjadi kerangka dasar untuk mewujudkan dan terwujudnya kelakuan. Dengan demikian kebudayaan

adalah seperangkat system aturan dari kelakuan manusia atau pola kelakuan seseorang sehingga kebudayaan tidak lain adalah sistem nilai budaya yang terdiri dari konsep-konsep yang hidup dalam pikiran mayoritas warga masyarakat akan berfungsi sebagai pedoman dan menempati kedudukan tertinggi bagi kelakuan manusia sehingga proses adaptasi dengan lingkungannya akan terpola dengan baik. Dari konsep tersebut yang ingin ditonjolkan adalah substansi akan pentingnya arti sistem nilai budaya.

Strategi Komunikasi Berbasis Agama dan Budaya

Pada dasarnya strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan komunikasi (*communication planning*) untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana pelaksanaan operasional secara taktis dilakukan, dalam arti bahwa pendekatan (*approach*) bisa berbeda tergantung pada situasi dan kondisi.

Arifin (1994:10) mengungkapkan bahwa berbicara tentang strategi komunikasi, berarti berbicara tentang bagaimana sebuah perubahan diciptakan pada khalayak dengan mudah dan cepat. Perubahan merupakan hasil proses komunikasi yang tak terelakkan. Semua pihak yang berkomunikasi, mau tidak mau pasti mengalami perubahan baik perubahan kecil maupun perubahan besar.

Dewasa ini, agenda penting bagi masa depan bangsa masih sangat tergantung pada sejauh mana hubungan antar umat beragama tercipta di tengah pluralisme agama dan budaya. Karena pluralisme agama itu sendiri masih merupakan tantangan khusus bagi agama-agama. Dari sinilah muncul arti pentingnya pencarian konvergensi agama-agama melalui pemanfaatan strategi komunikasi yang efektif. Ada beberapa argument penting sebagai kerangka acuan pemikiran akan arti pentingnya pencarian konvergensi agama-agama yaitu :

Pertama, pluralisme agama secara praktis belum dipahami umat beragama. Sehingga, yang tampil ekspresif ke atas permukaan adalah sikap eksklusifisme beragama. Sikap ini merasa bahwa ajaran yang paling benar adalah agama

yang dipeluknya. Sementara pada agama lain dianggap sebagai “yang salah” dan bahkan “sesat”. Maka, hukumnya menjadi wajib “diperangi” dan kalau perlu dikonversikan pada agamanya. Inilah akar konflik antar agama seringkali terjadi dan akhirnya merusak rajutan tata kerukunan umat beragama.

Bila ajaran Kristiani memandang kasih sebagai tonggak agamanya (Rachmat, 2004:56) maka dalam konsepsi Islam agama dipandang sebagai rahmat bagi kehidupan. Bahkan secara normatif, Islam mengakui hak dan keberadaan pengikut agama lain atau para ahli kitab. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah atau 2 : 256 dinyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Pada surah lain Allah juga menegaskan bahwa “untukmu agamamu dan untukku lah agamaku (Q.S. 109:6). Pengakuan ini secara otomatis merupakan prinsip dasar doktrin Islam terhadap pluralisme agama dan sosial budaya sebagai kehendak Tuhan.

Kedua, di tengah kondisi pluralisme agama ini, banyak pemeluk agama tertentu yang ber-paham eksklusif cenderung memonopoli klaim kebenaran agama (*claim of truth*) dan klaim keselamatan agama (*claim of salvation*). Padahal, secara sosiologis, menurut cendekiawan Budhy Munawar (dalam Kindi, 2001) bahwa klaim kebenaran agama dan keselamatan itu, disamping hanya akan memicu berbagai konflik sosial dan politik juga hanya akan memancing “perang suci antaragama”.

Agama sering diposisikan sebagai objek kajian metafisis yang hasil dan tingkat kebenarannya dianggap spekulatif, namun secara sosial kenyataannya dampak kehadiran agama merupakan sumber peradaban yang cukup besar dalam sejarah kemanusiaan, namun agama juga merupakan sumber konflik sosial yang amat kejam dan berkepanjangan.

Berbagai persoalan konflik atas nama agama dan etnik yang merebak di tengah masyarakat tidak lepas dari persoalan proses komunikasi yang tidak berjalan efektif, diungkap oleh Watzlawick, Beavin dan Jackson, bahwa “*We cannot not communicate !*” Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa dengan komunikasi, manusia mengekspresikan dirinya, membentuk jaringan interaksi sosial, dan mengembangkan

kepribadiannya (Khairil, 2005:1). Kegagalan dalam berkomunikasi akan berakibat fatal baik secara individu maupun sosial. Secara individual, kegagalan komunikasi menimbulkan frustrasi, demoralisasi, alienasi, dan penyakit-penyakit kejiwaan lainnya. Secara sosial, kegagalan komunikasi dapat menghambat saling pengertian, kerja sama, toleransi dan merintangi pelaksanaan norma-norma sosial.

Metode Penelitian

Sesuai fokus masalah penelitian, maka penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian kualitatif. Bogdan dan Biklen (1992:29-33) mengemukakan bahwa suatu penelitian yang didasarkan sebagai penelitian kualitatif memiliki karakteristik, antara lain; (a) *Qualitative research has the natural setting as the direct source of data and the researcher is the key instrument*; (b) *Qualitative research is descriptive*; (c) *Qualitative researchers are concerned with process rather than simply with outcomes or products*; (d) *Qualitative researchers tend to analyze their data inductively*; (e) *“Meaning” is of essential concern to the qualitative approach*.

Proses penelitian berlangsung senantiasa disesuaikan dengan fokus masalah penelitian yang sedapat mungkin terbangun secara alamiah. Data penelitian yang terkumpul melalui teknik penelitian yang dipilih akan berupa data deskriptif dalam bentuk rangkaian kata atau pernyataan deskriptif, meskipun tidak menutup kemungkinan data yang terkumpul akan berupa angka-angka.

Proses kerja penelitian dilakukan dengan menggunakan perspektif emik, dengan mengutamakan pandangan dan pendirian subjek penelitian terhadap situasi yang dihadapinya. Tingkat kepercayaan terhadap data yang diperoleh akan dilakukan dengan melakukan verifikasi dan validasi data melalui penerapan teknik penelitian yang beragam serta dilakukan terhadap subjek penelitian yang berbeda-beda, kemudian dilakukan penyesuaian-penyesuaian.

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat korban konflik di wilayah Kabupaten Poso Sulawesi Tengah yang dipilih secara *purposive* berdasarkan kriteria dan statusnya, lihat Tabel 1.

Tabel 1. Informan Kunci

NO	INFORMAN	JUMLAH
1	Pemerintah Daerah Kab. Poso	2
2	Ketua Dewan pemangku adat	1
3	Anggota Dewan pemangku adat	2
4	Tokoh Masyarakat Wil. Kota Poso dan Pamona Utara	2
5	Tokoh Agama Wil. Kota Poso dan Pamona Utara	2
6	<i>Stakholders</i>	4
Jumlah		13

Data Primer

Dalam penelitian ini, fakta yang akan dijadikan objek penelitian adalah *pertama*, kehidupan dan penghidupan masyarakat korban konflik. *Kedua*, program pemberdayaan masyarakat korban konflik. *Ketiga*, nilai-nilai pluralisme agama masyarakat Poso. *Keempat*, nilai-nilai budaya yang berkembang khususnya pasca konflik Poso. *Kelima*, pendekatan dan strategi komunikasi dalam proses pemberdayaan masyarakat korban konflik.

Untuk memberikan arah dan kejelasan metodologis maka penelitian ini menggunakan teknik *in depth interview*. Langkah analisis data penelitian ini mendasarkan pada model analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman (1992: 16) yang mengemukakan langkah analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang dilakukan secara simultan, yakni; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Dalam pengujian keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yaitu upaya pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Menurut Sugiyono (2008:125) terdapat tiga model triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Pada triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Hasil pengecekan tersebut selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dari berbagai sumber tersebut. Pada triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini, selain menggunakan teknik wawancara juga dilakukan dengan observasi dan dokumentasi sehingga triangulasi tekniknya dapat digunakan secara maksimal. Pada triangulasi waktu dilakukan melalui pengecekan dengan wawancara dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebelum konflik massal tahun 1998, Kabupaten Poso menjadi salah satu Kabupaten dengan berbagai karakteristik masyarakatnya yang plural. Meskipun masyarakatnya terdiri atas berbagai suku lokal dan pendatang, pembauran terjadi cukup baik. Masyarakat lokal memiliki budaya khas yang juga diadaptasi oleh para pendatang sehingga proses pembauran berjalan dengan sangat dinamis.

Sangat disayangkan suasana damai masyarakat Poso mulai terusik oleh ulah segelintir orang hanya karena persoalan sepele yang kemudian dibesar-besarkan hingga konflik pun terjadi secara massal. Perlu disadari bersama bahwa masyarakat Poso memiliki karakteristik khas psikologi massa yang jarang ditemui di daerah lain di Indonesia. Di Poso Kota khususnya yang saat ini didominasi oleh warga muslim terdapat ikatan solidaritas yang kuat satu dengan yang lainnya. Diungkap oleh Bapak Syarifuddin bahwa:

Salah satu ciri khas bentuk solidaritas masyarakat Poso ketika mendengar suara “toki-toki” (pukulan) tiang listrik di malam hari, dengan cepat masyarakatnya akan bersiaga sambil membawa alat yang dapat digunakan sebagai senjata. Suara tersebut seolah mengingatkan mereka bahwa ada serangan dari luar yang mengancam eksistensi mereka. Kontak dan komunikasi satu sama lain untuk mengetahui apa yang terjadi dengan sangat cepat terjalin.

Karakteristik khas psikologi massa tersebut kemudian memiliki efek terhadap tingkat solidaritas masyarakat Poso. Kejadian pada malam tanggal 24 Desember 1998, menjadi salah satu catatan penting mengenai bagaimana masyarakat Poso dalam menjalin kebersamaan.

Merunut kejadian awal konflik Poso sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Arifin Toamaka, salah seorang tokoh masyarakat bahwa:

“Sesungguhnya konflik berawal dari ulah beberapa orang pemuda yang sedang mabuk, salah seorang diantaranya bernama Roy Runtu Bisalemba, membawa senjata tajam, mendatangi salah satu mesjid di Pondok Pesantren Darussalam yang terletak di Kelurahan Sayo Kecamatan Poso Kota. Pada malam yang sama, Ahmad Ridwan, seorang Pemuda yang saat itu sedang tidur dalam mesjid tersebut dibangunkan dan tanpa alasan yang jelas dibacok hingga mengalami luka yang cukup parah di punggung dan lengannya”.

Informasi tentang penganiayaan yang dilakukan oleh pemuda pengangguran berusia 18 tahun, yang ternyata beragama Kristen terhadap Ahmad Ridwan 23 tahun dan ternyata beragama Islam dengan cepat beredar hampir keseluruhan kota Poso. Peristiwa tersebut menimbulkan sentimen agama yang kental karena terjadi ketika umat Islam sedang menjalani Ibadah Puasa di Bulan Suci Ramadhan, sementara umat Kristiani juga akan merayakan natal. Diurai lebih lanjut oleh Bapak Arifin bahwa :

“Pada malam tersebut berbagai isu menyebar tanpa kejelasan dan diterima oleh warga muslim dengan emosional sehingga keesokan harinya pada tanggal 25 Desember 1998, sekitar jam 14.30 setelah menjenguk korban di Rumah Sakit kemudian bergerak mendatangi Tokoh Lima di Jalan Sam Ratulangi yang menjadi tempat tinggal orangtua Roy dan melakukan pelemparan terhadap toko tersebut dengan batu dan kayu. Dari jalan Sam Ratulangi massa bergerak ke arah Jalan Yos Sudarso. Sasaran pengrusakan diarahkan pada rumah tempat tinggal Roy Bisalemba sang pelaku penganiayaan”.

Provokasi terus berlanjut. Aksi kekerasan, pengrusakan dan main hakim sendiri meluas dengan cepat. Hampir diseluruh penjuru kota Poso terjadi konsentrasi massa. Kerusuhan semakin tidak terkontrol dan meluas ke tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat maksiat dan telah menodai hikmatnya ibadah di bulan suci Ramadhan. Tempat-tempat tersebut antara lain hotel

atau losmen, diskotik, panti pijat, tempat bilyard, tokoh-tokoh dan restoran yang menjual minuman keras.

Konflik Poso yang kemudian mengkristal menjadi konflik umat beragama kian membesar hingga melibatkan berbagai pihak termasuk pihak-pihak yang berada di luar Kota Poso. Semangat solidaritas dan keberagamaan menjadi dua hal yang menggerakkan massa dari masing-masing umat beragama. Korban pun berjatuh dari kedua pihak. Bahkan masyarakat yang tidak berdosa dan tidak tahu apa-apa juga menjadi korban konflik. Konflik Poso yang dikenal oleh masyarakat Poso dalam periodeisasi yang disebut Konflik Poso Jilid I, Jilid II dan Konflik Poso Jilid III antara tahun 1998 hingga tahun 2000 menyisahkan trauma berkepanjangan yang memerlukan proses yang cukup panjang dalam upaya pemulihan korban konflik baik fisik terlebih lagi psikis.

Langkah-langkah Strategis dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat Poso dengan latar belakang konflik yang pernah terjadi sejak tahun 1998 dan mengalami puncaknya pada tahun 1999–2000 telah menimbulkan banyak persoalan yang membutuhkan penanganan baik secara fisik material maupun secara psikis spiritual. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, khususnya pemberdayaan masyarakat korban konflik maka langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut; (1) Pendidikan Damai Berbasis Pluralisme dan Multikulturalisme. Pendidikan damai berbasis pluralisme agama dan budaya ini sesungguhnya tidak semata dalam konteks pendidikan formal namun lebih pada nilai substansial pendidikan itu sendiri yaitu dalam rangka transformasi nilai-nilai pluralisme di tengah masyarakat. Pendidikan damai bagi generasi muda adalah metode yang dapat membentuk aspek pembangunan sikap yang dapat mencerminkan keadaan generasi muda yang siap dalam menghadapi perjalanan hidupnya utamanya di daerah yang telah dipenuhi oleh aroma konflik yang berkesinambungan bahkan dapat menjadi filter bagi berkembangnya timbunan konflik laten yang tidak sempat meledak dan menjadi bahaya laten yang dapat membawa kehancuran bagi generasi muda.

Sesungguhnya fungsi budaya dalam kehidupan sosial menurut Rochayanti (2005:42) menunjukkan bagaimana kita berdiri pada saat berbicara dengan orang lain dan pada saat mengekspresikan perasaan cinta di depan publik yang diperlihatkan oleh seseorang. Dalam interaksi budaya lahirlah multikulturalisme.

Kompleksitas peta multikultural melahirkan berbagai model pengelolaan masyarakat berbasis multibudaya. Menurut Alwi Dahlan (2004:3) setidaknya memberikan dua alternatif model yaitu *Melting Pot* seperti yang dulu dianggap berhasil oleh Amerika Serikat. Semua orang yang datang dari berbagai asal ras dan etnik digodok di dalam panci tunggal untuk membuatnya menjadi satu “masakan”. Model ini kemudian dikritik sebab terlalu dikuasai oleh kultur dominan(dikenal sebagai “WAPS”) sehingga lahirlah alternatif model kedua yaitu *Tossed Salad* (‘Gado-gado Barat’). Bagaikan rasa unik masing-masing sayurnya, ciri masing-masing sub kultur dalam model ini tetap dipertahankan tetapi masing-masing memberi sumbangan kepada kultur bersama yang diciptakan oleh ‘saus’ salada kebangsaan.

Model pertama yaitu “WAPS” sesungguhnya mencerminkan masyarakat Poso sebelum konflik. Satu komunitas lebih dominan dari komunitas lainnya. Sebagai contoh, wilayah Pamona Utara, itu lebih didominasi oleh mayoritas umat Kristen. Seperti yang diungkap oleh Bapak Yafferson, Camat Pamona utara bahwa;

“Untuk wilayah Pamona Utara ini memang mayoritas masyarakatnya beragama Kristen. Bahkan di daerah ini berdiri organisasi Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST). Namun tidak berarti muslim tidak boleh tinggal disini. Negara kita ini Negara kesatuan yang dilindungi oleh Undang-Undang. Setiap warga Negara berhak untuk hidup dan berkebangsaan dimana saja, termasuk di Pamona Utara ini”.

“Pada saat konflik terjadi, memang setiap daerah di Kabupaten Poso ini punya dikotomi berdasarkan penduduk mayoritas. Misalnya untuk wilayah muslim di Poso Kota dan Pesisir dan untuk wilayah Kristen di Tentena, Taripa dan daerah Pamona Utara ini”.

Inti dari perubahan pada model kedua terletak pada sikap multikulturalism, dimana setiap sub kultur betapapun kecilnya harus dihargai dan diberi hak yang sama dengan kultur yang lebih dominan. Bagi masyarakat Poso pasca konflik maka peneraman dan pemanaan serta upaya implementatif dari model kedua inilah yang lebih relevan untuk diterapkan karena bagaimanapun masyarakat yang minoritas di tengah yang mayoritas tentu akan merasa terkucilkan. Hal ini diungkap oleh Perasim, salah seorang tokoh masyarakat Tentena, bahwa;

“Saat konflik terjadi, bagi kami dan mungkin juga bagi masyarakat muslim yang adalah “merah” dan “putih”. “Putih” berarti anda muslim dan “merah” berarti anda Kristen. Setiap anggota masyarakat Poso ini memetakan diri dan bergabung dari yang minoritas ke yang mayoritas. Orang Islam yang ada di Tentena, memilih ke Poso kota untuk bergabung. Sebaliknya orang Kristen yang ada di mayoritas muslim akan mengungsi ke Tentena sebagai basis masyarakat Kristen.

Tapi itu dulu, saat konflik. Sekarang ini sudah tidak terjadi lagi. Sebagai muslim, saudara bisa mendengarkan kumandang azan di mayoritas Kristen. Sebaliknya, saudara Nasrani juga diberi hak melaksanakan ibadah di Gereja-gereja yang mayoritas Islam. Poso kota misalnya.”

Mandulnya pendidikan multikultural pada tingkat praksis bisa jadi disebabkan masih dominannya wacana “toleransi” dalam menyikapi realitas multikultural tersebut. Toleransi hanya mungkin terjadi apabila orang rela merelativisasi klaim-klaimnya sebagaimana diungkap oleh Richard Rorty (Dalam Marzuki, 2007:8), seorang filsuf neo-pragmatis. Penghargaan atas yang lain sebagaimana dibayangkan dalam “toleransi” memang dibutuhkan. Namun, toleransi seringkali terjebak pada ego-sentrisme. Ego-sentrisme di sini adalah sikap saya mentoleransi yang lain demi saya sendiri. Artinya, setiap perbedaan mengakui perbedaan lain demi menguatkan dan mengawetkan perbedaannya sendiri (*I am what I am not*).

Menggugah kesadaran bahwa multikulturalisme dan pluralisme, sebagaimana diungkap oleh Goodenough (1976:89) adalah

pengalaman normal manusia. Ia ada dan hadir dalam realitas empirik. Untuk itu, pengelolaan masyarakat multikultural Indonesia tidak bisa dilakukan secara *taken for granted* atau *trial and error*. Sebaliknya harus diupayakan secara sistematis, pragmatik, integratif, dan berkesinambungan. Di sinilah fungsi strategis pendidikan berbasis multikultural sebagai sebuah proses di mana seseorang mengembangkan kompetensi dalam beberapa sistem standar untuk mempersepsi, mengevaluasi, meyakini dan melakukan tindakan.

(2) Penguatan Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat. Untuk mengetahui sampai seberapa besar kepemilikan modal sosial masyarakat, akan sangat ditentukan oleh seberapa tinggi unsur-unsur perasaan simpati, peduli, rasa saling percaya, dan ketaatan terhadap norma-norma yang disepakati tersebut ada pada seseorang terhadap orang lain. Dan modal sosial masyarakat itu akan dengan mudah tumbuh dan berkembang manakala jaringan sosial masyarakat terus dibangun dan diperkuat, serta hubungan personal antarwarga masyarakat terus diintensifkan.

Modal sosial masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang dari hasil hubungan personal antarwarga masyarakat, di era modern saat ini sedang mengalami desakan yang amat kuat. Hal ini tidak terlepas dari pola perubahan kehidupan masyarakat yang semakin mendewakan materi dan prestasi, serta kehidupan dunia kerja yang semakin mengutamakan efisiensi dan produktivitas.

Dalam situasi seperti ini, waktu dan ruang yang tersedia untuk melakukan interaksi dan transaksi sosial dengan sesama atau antarwarga masyarakat semakin sempit, terutama pada kehidupan masyarakat perkotaan yang sebagian besar warganya bekerja di sektor modern. Dan karena itu, hubungan sesama atau antarindividu warga masyarakat cenderung bersifat impersonal, suatu bentuk hubungan yang justru dapat memperlemah modal sosial masyarakat yang sudah ada.

Proses melemahnya modal sosial masyarakat tersebut bisa mengarah pada kondisi serba prasangka, dari keadaan sulit untuk saling percaya (*distrust*) menuju ke prasangka (*prejudice*). Dalam kondisi krisis kepercayaan, apa pun

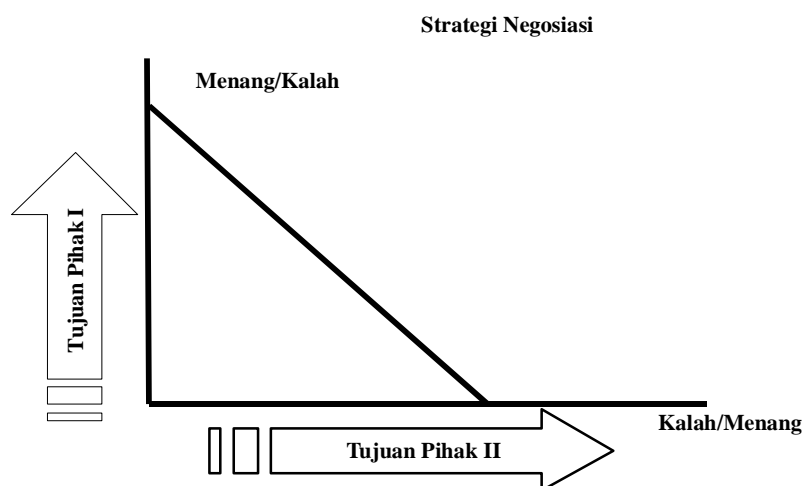
yang dilakukan oleh mereka yang sudah tidak dipercayai, bahkan prestasi sekalipun tak ada barmanya. Bahkan ketika orang yang dijadikan sasaran prasangka tidak atau belum melakukan tindakan apa-apa, masyarakat sudah tidak melihat kebenaran padanya. Kebenaran sudah tidak ada disana. Itu berarti, prasangka jauh lebih memprihatinkan dan berbahaya.

Dalam situasi dimana hubungan antarwarga masyarakat dalam keadaan sulit untuk saling percaya (*zero trust*), mereka akan dengan mudah digoyang, digerus, dan digerogeti oleh berbagai penyakit sosial yang pada gilirannya justru akan menurunkan kualitas kehidupannya. Dalam situasi itu, perubahan sikap dan perilaku masyarakat pun sangat mudah terjadi.

Jika kita melakukan kilas balik, membuka lembaran lama yang menjadi kenangan buruk bagi sebagian besar warga masyarakat Poso, maka terungkaplah peristiwa demi peristiwa yang menyulut kekacauan dan menyeret kehidupan masyarakat ke lembah kekerasan massal disana. Dari peristiwa ke peristiwa, akan terungkap ada atau tidaknya modal sosial masyarakat, dan seberapa besar kepemilikan modal sosial masyarakat dapat membangun damai atau sebaliknya mendorong munculnya konflik dan kekerasan di daerah ini.

Dengan mempergunakan kacamata pembesar modal sosial, fenomena di atas menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kuatnya keharmonisan dan solidaritas sosial dalam internal kelompok masyarakat (*bonding social capital*) dengan kuatnya keharmonisan dan solidaritas sosial lintas kelompok masyarakat yang mampu menjembatani adanya perbedaan-perbedaan antar kelompok masyarakat (*bridging social capital*).

Ringkasnya, dari uraian di atas menunjukkan bahwa hubungan antar dan inter elemen masyarakat di Kabupaten Poso saat ini sedang berada pada titik terendah (nadir). Kedamaian dan modal sosial sudah mulai terusik, tentu saja yang paling menyedihkan adalah krisis kepercayaan internal, yakni kepercayaan masyarakat kepada para birokrat di jajaran pemerintah daerah, elite politik, serta para pemimpin daerah. Karena itu, menjadi pekerjaan rumah kita bersama untuk kembali merajut tali *silaturahmi*, dan membangun budaya saling percaya (*interpersonal trust*) diantara mereka, agar kedamaian dan modal sosial itu tidak



Gambar 7: Proses Negosiasi

semakin menjauh dari kehidupan masyarakat.

Strategi Komunikasi dalam Pemberdayaan Masyarakat

Menyisakan agenda dan percepatan pemulihan kesejahteraan masyarakat dalam mempertahankan perdamaian di Kabupaten Poso, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pendekatan strategi komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan strategi komunikasi pemberdayaan masyarakat maka ditemukan beberapa pendekatan yaitu; (1) Pendekatan melalui strategi komunikasi antarpribadi. Dalam kaitannya dengan proses penyelesaian konflik, pendekatan melalui komunikasi antar pribadi (*interpersonal*) misalnya ditempuh melalui musyawarah atau perundingan yang dilakukan secara langsung di antara para pihak, juga melalui pihak ketiga netral yang disebut sebagai mediator atau arbiter yang didasarkan atas prinsip sukarela (*voluntary*) diantara para pihak, termasuk dalam hal memilih mediator harus dengan kesepakatan dua belah pihak. Proses perundingan, negosiasi, musyawarah dan bentuk pertemuan tatap muka lainnya yang disesuaikan dengan kondisi lokal merupakan inti pendekatan komunikasi antar pribadi.

Fisher dan Ury (Hadi, 2004) menyebutkan bahwa musyawarah atau negosiasi adalah cara mendasar untuk mendapatkan dari pihak lain. Sebuah komunikasi timbal balik yang dirancang untuk mencapai kesepakatan ketika para pihak memiliki

kepentingan (*interest*) untuk dibagi dan posisi untuk dipertentangkan.

Dalam pendekatan ini proses awal perundingan dimulai melalui adanya komunikasi di antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam komunikasi tatap muka, ada perasaan, pesan (*message*) dan isi dari pesan dimaksud. Dengan tiga pesan ini, masing-masing pihak mengetahui apa yang menjadi kepedulian, posisi dan kepentingan pihak lainnya. Hal ini sesuai yang diungkap oleh Sulaeman Mamar, salah seorang Tim Pokja Perdamaian Malino bahwa;

Saya ditugaskan sebagai juru bicara yang mewakili umat Islam sewaktu pertemuan di Malino. Tentu saja saya harus melakukan pendekatan-pendekatan secara personal kepada orang-orang Islam tentang apa yang menjadi keinginan mereka. Kunci kesuksesan Malino adalah intensitas komunikasi yang dibangun secara personal dari orang ke orang dan mengajak mereka untuk duduk bersama demi terciptanya perdamaian.

Apa yang diungkapkan oleh Sulaeman Mamar, merupakan bagian dari strategi komunikasi interpersonal yang lebih mengedepankan mediasi dan negosiasi. Berikut adalah ilustrasi dalam konteks negosiasi;

Gambar di atas menunjukkan posisi masing-masing pihak yang bersengketa. Jika solusi ke arah vertikal maka akan menjadi kemenangan pihak pertama. Tetapi jika solusi ke arah horisontal, akan menjadi kemenangan pihak kedua. Hal ini juga merefleksikan penyelesaian yang mengun-

tungkan kedua belah pihak (*win-win solution*) melalui sebuah kompromi setelah diadakan komunikasi secara intensif melalui negosiasi, musyawarah.

Dalam suatu pertemuan, jika masing-masing pihak tetap bertahan pada posisinya, tidak akan tercapai solusi, untuk ini masing-masing pihak harus juga memahami posisi pihak lain. Dengan demikian akan terbuka kemungkinan sebuah solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan dua belah pihak.

Bila penyelesaian tercapai, maka pendekatan ini setidaknya telah memenuhi tiga aspek pemenuhan kebutuhan pihak-pihak yang berkonflik yaitu *pertama* aspek substansi yakni bahwa pihak yang berkonflik memperoleh kesepakatan sesuai harapan yang bisa dimanifestasikan dalam bentuk penggantian kerugian atau komitmen pihak lain sesuai dengan kesepakatan. *Kedua*, kepuasan prosedural, artinya bahwa penyelesaian konflik dilakukan melalui prosedur yang mereka sepakati bersama. *Ketiga*, secara psikologis pihak yang berkonflik merasa menjadi bagian dari proses.

Ketiga aspek pemenuhan kebutuhan pihak-pihak yang berkonflik tersebut, juga dilakukan dalam upaya perdamaian di Poso yang diimplementasikan dengan metode pendekatan komunikasi interpersonal dan menghasilkan sebuah deklarasi sebagai hasil kesepakatan bersama yang isinya sebagai berikut;

Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa, kami yang mewakili masyarakat Muslim dan Kristiani Poso serta kelompok-kelompok yang ada, setelah mengalami dan menyadari bahwa konflik yang berlangsung selama tiga tahun terakhir ini di Kabupaten Poso dan Morowali, telah membawa penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan bagi rakyat, maka dengan hati yang lapang dan jiwa yang terbuka, sepakat; (1) Menghentikan semua bentuk konflik dan perselisihan; (2) Menaati semua bentuk dan upaya penegakan hukum dan mendukung pemberian sanksi hukum bagi siapa saja yang melanggar; (3) Meminta aparat negara bertindak tegas dan adil untuk menjaga keamanan; (4) Untuk menjaga terciptanya suasana damai, menolak memberlakukan keadaan darurat sipil, serta campur tangan pihak asing; (5) Menghilangkan seluruh fitnah dan ketidakjujuran ter-

hadap semua pihak dan menegakkan sikap saling menghormati dan memaafkan satu sama lain, demi terciptanya kerukunan hidup bersama; (6) Tanah Poso adalah bagian integral dari Republik Indonesia. Karena itu setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, datang dan tinggal secara damai dan menghormati adat istiadat setempat; (7) Semua hak-hak dan kepemilikan harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, sebagaimana adanya sebelum konflik dan perselisihan berlangsung; (8) Mengembalikan seluruh pengungsi ke tempat asal masing-masing; (9) Bersama pemerintah melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi secara menyeluruh; (10) Menjalankan syariat agama masing-masing dengan cara dan prinsip saling menghormati dan menaati segala aturan yang telah disetujui, baik dalam bentuk undang-undang, maupun peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan lainnya.

(2) Pendekatan melalui strategi komunikasi antar kelompok dan organisasi. Strategi komunikasi dalam proses pemberdayaan masyarakat berbasis pluralisme agama dan budaya kaitannya dengan komunikasi kelompok dan organisasi ini adalah diungkap Nasruddin, Kepala Departemen Agama Kabupaten Poso bahwa;

“Kelompok-kelompok keagamaan maupun organisasi-organisasi keagamaan yang ada di Kab. Poso ini semestinya kita berdayakan dengan pola pendekatan muatan-muatan atau nilai-nilai pluralisme agama. Jangan sampai muncul kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi yang eksklusif dan memandang kebenaran hanya dari satu sudut pandang. Di khawatirkan lagi bahwa muncul klaim-klaim kebenaran mutlak dan “pengkafiran” terhadap aliran yang berbeda.

Untuk memberi wadah bagi berbagai kepentingan masyarakat dalam kaitannya dengan fasilitasi pemahaman keagamaan yang *inclusive* maka telah dibentuk Forum komunikasi ummat Beragama atau yang dikenal FKUB. Forum ini menjadi representasi umat beragama dari berbagai agama. Islam ya ada, Kristen juga masuk, Budha Hindu kita libatkan. Pokoknya kita menginginkan organisasi ini menjadi payung atau wadah aspirasi masyarakat sekaligus sarana transformasi nilai-nilai keagamaan yang menghargai plu-

ralisme, toleransi dan budaya komunikasi umat beragama”.

Terbentuknya organisasi FKUB sesungguhnya menjadi bagian dari strategi komunikasi organisasi untuk dapat melakukan upaya transformasi ideologi radikal yang cenderung anarkis menuju ideologi pluralis yang lebih humanis. Keberadaan organisasi FKUB dengan struktur organisasi dan kepengurusan yang melibatkan seluruh elemen umat beragama akan menjadi representasi bagi kepentingan pemeluk agama untuk dapat menjalankan ibadah dan keyakinan mereka yang didasarkan pada toleransi dan budaya komunikasi yang lebih humanis.

(3) Pendekatan melalui strategi komunikasi massa. Komunikasi massa diartikan sebagai jenis komunikasi yang ditujukan kepada seluruh khalayak yang tersebar, heterogen dan anonim melalui media cetak atau elektronis sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Perkataan “dapat” dalam definisi ini menekankan pengertian bahwa jumlah sebenarnya penerima komunikasi massa pada saat tertentu tidaklah esensial. Media massa dapat dipahami sebagai suatu alat transmisi informasi, seperti koran, majalah, televisi, radio, atau kombinasi bentuk dari bentuk-bentuk media tersebut.

Ketika media memberitakan suatu peristiwa dengan orientasi tertentu maka aspek yang harus menjadi perhatian adalah dengan melihat pendekatan yang digunakan. Dalam hal ini ada tiga pendekatan untuk menjelaskan isi media yaitu *pertama*, pendekatan politik ekonomi (*The political-economy approach*) bahwa isi media ditentukan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik diluar pengelolaan media. *Kedua*, pendekatan organisasi (*organizational approach*) bahwa isi media merupakan hasil dari mekanisme yang ada dalam ruang redaksi. *Ketiga*, pendekatan kultural (*cultural approach*) bahwa proses produksi berita dilihat sebagai mekanisme yang rumit yang melibatkan faktor internal media (rutinitas organisasi media) sekaligus juga faktor eksternal di luar diri media diantaranya adalah faktor budaya.

Media massa dapat mengukuhkan norma-norma budaya dengan informasi-informasi yang disampaikannya, media massa juga dapat mengaktifkan perilaku tertentu, apabila informasi yang

disampaikannya sesuai dengan kebutuhan individu serta tidak bertentangan dengan norma budaya yang berlaku, bahkan media massa dapat menumbuhkan norma budaya baru dalam perilaku selama norma tersebut tidak dihalangi oleh hambatan-hambatan sosial budaya.

Dalam konteks mewujudkan perdamaian di Poso melalui proses pemberdayaan masyarakat maka strategi komunikasi massa itu dapat dilihat seperti halnya yang diuraikan oleh J. Santo, Ketua Dewan Adat Masyarakat Poso dalam petikan wawancara berikut;

“Masyarakat Poso ini punya banyak nilai budaya. Pengembangan nilai budaya dalam beberapa tahun terakhir ini diwujudkan dalam Festival Danau Poso. Ruh kegiatan tersebut selain ajang melestarikan nilai budaya juga sesungguhnya ingin menunjukkan pada dunia luar bahwa Poso tidak lagi seseram yang orang bayangkan. Poso sudah kembali damai dengan kekayaan budaya masyarakat yang dimilikinya”.

Upaya untuk mempublikasikan kondisi Poso dengan berbagai aktivitas budaya melalui media massa menjadi salah satu strategi untuk dapat mewujudkan perdamaian di Poso. Ini terbukti dengan berbagai publikasi yang dilakukan oleh media massa termasuk melalui Radar Sulteng, salah satu media terbesar yang ada di Sulawesi Tengah. Dalam pemberitaannya dengan judul “Poso Aman Berinvestasi dan Berwisata”. Berikut adalah kutipan berita yang dimuta di Radar Sulteng;

Pemerintah dan masyarakat Poso siap menyambut sekaligus mensukseskan pelaksanaan Festival Danau Poso (FDP). Selain berharap sukses, FDP kali ini juga digadang mampu meyakinkan masyarakat luar daerah Poso dan Sulteng bahwa Poso saat ini aman untuk berinvestasi dan berwisata (18/11/2008).

Keberadaan media massa sebagai institusi sosial sesungguhnya merupakan media komunikasi massa yang berperan penting untuk memberikan pencerahan bagi kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi dan kesadaran hukum bagi masyarakat. Konstitusi Negara (UUD 1945), Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang pers, dan Undang-undang No. 32 tentang penyiaran sebetulnya mem-

berikan kebebasan bagi media massa secara bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, sekaligus berperan sebagai kontrol sosial dan perekat sosial.

Simpulan

Pertama, Kehidupan masyarakat Poso terbagi dalam tiga fase yaitu pra konflik, saat konflik dan pasca konflik. Pra konflik, masyarakat Poso hidup berdampingan dengan semboyan *sintuwu maroso*. Saat konflik, masyarakat terbagi berdasarkan wilayah mayoritas pemeluk agama. Wilayah Kota Poso dan Poso Pesisir menjadi bagian dari basis umat Islam dan Wilayah Pamona menjadi basis wilayah Umat Kristen. Hal ini berjalan selama konflik Jilid I, II dan III. Pasca konflik, masyarakat sudah kembali pada kehidupan awal seperti halnya sebelum Konflik. Yang menonjol pasca konflik adalah isu terorisme walau tidak begitu mengemuka.

Kedua, langkah-langkah strategis dalam upaya pemberdayaan masyarakat setidaknya dilakukan dalam dua hal yaitu pertama, pendidikan damai berbasis pluralisme agama dan budaya dan penguatan modal sosial.

Ketiga, pendekatan strategi komunikasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan berbasis pada pluralisme agama dan budaya. Pendekatan yang dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu komunikasi antarpersonal dalam bentuk negosiasi, komunikasi kelompok dan organisasi dalam bentuk pembentukan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dan komunikasi massa berbasis budaya seperti halnya publikasi pelaksanaan Festival Danau Poso (FDP).

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Kepala Pusat Penelitian Perdamaian dan Pengelolaan Konflik, Bapak Drs. Muhammad Marzuki, M.Si atas dukungannya dalam penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga kepada masyarakat Poso yang telah bersedia berbagi informasi sehingga penulis dapat menye-

lesaikan penelitian ini dan mewujudkannya dalam karya ilmiah yang dipublikasikan melalui Jurnal Ilmu Komunikasi Program studi Ilmu Komunikasi FISIP UPN "Veteran" Yogyakarta.

Daftar Pustaka

- Arifin, Anwar, 1994, *Strategi Komunikasi: Sebuah Pengantar Ringkas* (cetakan ketiga Desember 1994), CV Armico, Bandung.
- Bogdan Robert C., Biklen Kopp Sari, 1982, *Qualitative Research For Education; An Introduction to Theory and Methods*, Allyn and Bacon, Inc., Boston London.
- Creswell, W. John, 1994, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, Sage Publications, London.
- Dahlan, Alwi, 2004, Tantangan Komunikasi Masyarakat Multikultural Indonesia, dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi FISIP UPN "Veteran" Yogyakarta* Volume 2, Nomor 1, Edisi Januari-April 2004.
- Fisher, Simon dkk., 2001, *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, Cetakan Pertama 2001, Penerbit: The British Council, Jakarta.
- Hidayat, Komaruddin, 2001, *Agama di Tengah Kemelut*, Mediacita, Jakarta.
- Khairil, Muhammad, 2005, Pencerahan Menuju Tuhan (Kajian Filasafat Komunikasi Interpersonal Dalam Islam), dalam *Jurnal Academica*, FISIP UNTAD, Nomor 14 Edisi September.
- _____, 2006, Pengaruh Pemberitaan terorisme dalam media Massa terhadap Gerakan Organisasi Islam di Kota Makassar, dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi FISIP UPN "Veteran" Volume 4*, Nomor 2, Edisi Mei-Agustus.
- _____, 2007, Pluralisme, Toleransi dan Budaya Komunikasi Ummat Beragama, dalam *Jurnal Inspirasi MKDU-Universitas Tadulako* Nomor III, Edisi Agustus.
- Koentjaraningrat, 1990, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta.
- Maliki, dkk., 2000, *Agama Rakyat Agama*

- Penguasa*, Yayasan Galang, Yogyakarta.
- Marzuki, Muhammad, 2006, *Konflik Komunal di Indonesia, Solusi dan Penanganan Pasca Konflik (Poso dan Maluku)*, Universitas Jember.
- _____, 2007, Membangun Toleransi dalam Pluralisme Agama, dalam *Jurnal Perdamaian* Pusat Penelitian Perdamaian dan Pengelolaan Konflik Universitas Tadulako.
- Meuleman, Johan, 2001, *Islam in the Era of Globalization: Muslim Attitudes Towards and Identity*, INIS, Jakarta.
- Miall Hugh, Ramsbotham Oliver and Woodhouse Tom, 2000, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola, dan Mengubah Konflik Bersumber Konflik, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Milles, M.B. and Huberman, M.A., 1984, *Qualitative Data Analysis*, Sage Publication, London.
- Nur, Yunidar, 2008, Upaya Mengurangi Potensi Konflik Melalui Pendidikan Damai Multibudaya Berbasis Sekolah, dalam *Jurnal Perdamaian* Pusat Penelitian Perdamaian dan Pengelolaan Konflik Universitas Tadulako Nomor 1, Edisi Februari 2007.
- Rakhmat, Jalaluddin, 2004, *Psikologi Agama*, Mizan Pustaka, Bandung.
- Rochayanti, Cristina, 2005, Budaya dan Komunikasi Nonverbal (Pengaruh Budaya dalam Mempersepsikan Pesan-pesan Nonverbal dalam Komunikasi Tatap Muka), dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi FISIP UPN "Veteran"* Volume 3, Nomor 1, Edisi Januari-April.
- Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Van De Merwe, Hugo, 2002, *The Truth and Reconciliation Commission and Community Reconciliation; an analysis of Competing Strategies and conceptualizations*.